

## PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI EKONOMI SISWA SEKOLAH DASAR

Laurentius Saptono<sup>1)</sup>, Ery Tri Djatmika Rudijanto W.W.<sup>2)</sup>, Hari Wahyono<sup>3)</sup>,  
Sri Umi Mintarti Widjaja<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Dosen Universitas Sanata Dharma dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang.  
E-mail: spto.pakusd@gmail.com

<sup>2), 3), 4)</sup> Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Malang. E-mail: pascasarjana@um.ac.id.

---

### Abstrak

*Literasi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Setiap hari semua orang membuat keputusan ekonomi atau keputusan lainnya yang memiliki dampak secara ekonomi. Keputusan ekonomi yang dibuat oleh setiap orang idealnya dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan skala prioritas pemenuhan kebutuhannya. Untuk mencapai hal itu sejak anak menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), mereka perlu mendapatkan pendidikan ekonomi yang cukup dan tepat. Upaya tersebut telah lama dilakukan secara serius di banyak negara maju, sedangkan di Indonesia tampak nyata bahwa pendidikan ekonomi di SD belum mendapatkan perhatian yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembenahan pendidikan ekonomi di SD yang setidaknya mencakup: peningkatan kapasitas guru kelas tentang literasi ekonomi, pengembangan kurikulum dan sumber-sumber belajar, peningkatan kapasitas siswa sebagai pembelajar ekonomi, dan peninjauan kurikulum calon guru SD.*

**Kata kunci:** literasi ekonomi, kurikulum, pendidikan ekonomi

---

### PENDAHULUAN

Pendidikan ekonomi telah mengalami kebangkitan (*revival*) sejak tahun 1960-an (Lo et al., 2008). Para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan mulai saat itu memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan di bidang pendidikan ekonomi. Setidaknya ada dua alasan mengapa mereka melakukannya: pertama, pengetahuan ekonomi diperlukan oleh setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang semakin kompleks. Pengetahuan ekonomi akan mendukung pengambilan keputusan dalam

kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun keputusan yang akan dibuat mungkin tidak berhubungan dengan persoalan ekonomi, pengetahuan ekonomi tetap diperlukan untuk memahami adanya kemungkinan dampak ekonomi atas keputusan tersebut (Bethune, 2000; OECD, 2005; Jappelli, 2010); kedua, ada peningkatan minat dari berbagai kalangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan ekonomi pada semua jenjang pendidikan (Varum et al., 2013).

Telah banyak penelitian dan makalah (*paper*) pada bidang pendidi-

kan ekonomi sejak awal kebangkitannya. Penelitian Johnson (1979), Marlin dan Durden (1993), dan *paper* dari Dumke (1977), Stigler (1983), Davies (2006), serta Lucey dan Giannangelo (2006), misalnya, dipandang sebagai penelitian dan *paper* yang memiliki kontribusi yang penting untuk pengembangan pendidikan ekonomi. Mereka menggagas tentang pentingnya setiap orang untuk melek secara ekonomi agar mampu menjadi warga negara yang lebih 'maximalist'. Untuk mewujudkan gagasan itu, karenanya, pendidikan ekonomi disarankan mulai diberikan sejak anak-anak berusia dini atau setidaknya sejak mereka mulai bersekolah (Walstad, 1992; Soper dan Walstad, 1991; Bethune, 2000).

Ada beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan ekonomi bagi anak-anak pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan temuan beberapa penelitian, permasalahannya sebagai berikut: 1) masih sering diabaikan pendidikan ekonomi untuk siswa pada jenjang pendidikan dasar yang disebabkan oleh hal-hal berikut: adanya pandangan/anggapan bahwa pendidikan ekonomi bagi siswa belum dibutuhkan, tidak tersedianya waktu yang cukup untuk pembelajaran eko-

nomi di kelas, dan tidak memadainya jumlah guru di sekolah (Bethune, 2000); 2) para guru merasa kesulitan untuk memahami hal-hal yang penting tentang ekonomi kepada siswa (Stigler, 1983); dan 3) adanya kekhawatiran dampak kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada penyelenggaraan pendidikan ekonomi di sekolah (Ma dan Weisse, 2009).

Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan ekonomi di atas tampak nyata juga dirasakan di Indonesia. Struktur kurikulum SD saat ini, baik Kurikulum 2006 (KTSP) maupun Kurikulum 2013, menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam struktur kurikulum, seperti halnya Matematika, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Pendidikan ekonomi tidak hanya kurang waktu karena diintegrasikan dalam pendidikan IPS, tetapi juga dari sisi muatan pendidikan ekonomi tidak memberikan dasar bagi anak untuk melek ekonomi. Hal ini diperparah oleh latar belakang pendidikan guru-guru SD yang umumnya memiliki bekal pengetahuan yang minim tentang ekonomi. Dampaknya, para guru kesulitan memahami ekonomi dan akhirnya mereka mengalami

kesulitan memahami pengetahuan ekonomi kepada para siswa.

Muara permasalahan di atas tampak dalam hasil-hasil survei dan penelitian tentang pendidikan ekonomi. Survei VISA tahun 2012 tentang tingkat literasi finansial, misalnya, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rendah (ranking 27 dari 28 negara yang disurvei). Hasil survei ini konsisten dengan temuan penelitian Chen dan Volpe (1998) tentang literasi keuangan mahasiswa Indonesia yang menunjukkan tingkat yang rendah. Dari keseluruhan jumlah pertanyaan, secara rerata mahasiswa hanya mampu menjawab benar sebanyak 53%-nya. Capaian ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Literasi finansial memang hanyalah bagian dari literasi ekonomi. Namun dua hasil riset literasi finansial tersebut setidaknya memberikan potret tentang belum berhasilnya pendidikan ekonomi di tanah air. Kekurangberhasilan pendidikan ekonomi pada jenjang pendidikan tinggi tersebut patut diduga juga disumbang oleh kekurangberhasilan pendidikan ekonomi pada jenjang pendidikan sebelumnya (dasar maupun menengah).

Makalah ini dimaksudkan untuk memaparkan tentang perlunya dilakukan pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi untuk meningkatkan literasi siswa pendidikan dasar (SD). Pengembangan kurikulum ini diharapkan meningkatkan literasi ekonomi bagi siswa SD dan sekaligus juga diharapkan memberikan pondasi untuk pendidikan ekonomi pada jenjang selanjutnya. Secara kronologis makalah ini dirancang untuk menguraikan: pertama, problematika pendidikan di SD; kedua, pembelajar ekonomi perlu melek ekonomi, ketiga, pentingnya pendidikan ekonomi bagi siswa SD; dan keempat, gagasan tentang pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi di SD.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **1. Problematika pendidikan ekonomi di SD**

#### **a. Kedudukan pendidikan ekonomi dalam struktur kurikulum SD**

Struktur kurikulum pada jenjang pendidikan SD/MI meliputi seluruh substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai Kelas I - VI. Dalam struktur kurikulum jenjang pendidikan dasar

(SD/MI), pendidikan ekonomi ngan bagian dari struktur kurikulum diintegrasikan dalam pendidikan IPS. SD berdasarkan Kurikulum 2016 dan Pendidikan IPS diberikan pada kelas Kurikulum 2013 (Tabel 1).  
IV – VI. Berikut ini disajikan foto-

**Tabel 1. Struktur Kurikulum Kelas IV, V, VI SD/MI**

Komponen/Mata Pelajaran	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
	Alokasi waktu per minggu	
A. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama/Pendidikan Agama dan Budi Pekerti*)	3	4
2. Pendidikan Kewarganegaraan /Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*)	2	5
3. Bahasa Indonesia	5	7
4. Matematika	5	6
5. Ilmu Pengetahuan Alam	4	3
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	3	3
7. Seni Budaya dan Keterampilan/Seni Budaya dan Prakarya*)	4	5
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	4
B. Muatan Lokal	2	-
C. Pengembangan Diri	2	-
Jumlah	32	36

\*) Nama mata pelajaran dalam Kurikulum 2013

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013

Struktur kurikulum SD (Kurikulum 2006 dan 2013) di atas menggambarkan bahwa pendidikan ekonomi tidak berdiri sebagai mata pelajaran yang mandiri. Mata pelajaran ekonomi diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. Dalam Kurikulum 2006, materi ekonomi untuk kelas I – III dengan pendekatan tematik dan pada kelas IV – VI dalam mata pelajaran IPS Terpadu, sementara pada Kurikulum 2013 materi ekonomi dari kelas I – VI diinte-

grasikan dengan materi pelajaran lain yang relevan dan disajikan secara tematik.

Dilihat dari sisi jumlah jam pelajaran, pada Kurikulum 2006 mata pelajaran IPS untuk kelas IV – VI sama dengan mata pelajaran seperti agama, yaitu 3 jam; lebih banyak dari mata pelajaran PKn, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri; tetapi di bawah jumlah jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matema-

tika, IPA, Seni dan Keterampilan, dan juga Pendidikan Jasmani, Olah raga, dan Kesehatan. Sementara pada Kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran IPS tetap sama dengan Kurikulum 2006, yaitu 3 jam, sama dengan mata pelajaran IPA. Jumlah jam pelajaran tersebut lebih rendah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Ke-

sehatan. Jumlah jam yang sangat terbatas pada kedua kurikulum menggambarkan bahwa pendidikan ekonomi belum mendapatkan tempat yang layak di SD atau bahkan dapat dikatakan pendidikan ekonomi cenderung terabaikan.

Tabel 2 berikut ini menyajikan kompetensi dasar yang berhubungan dengan ekonomi untuk siswa SD berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan SD.

**Tabel 2. Kompetensi Dasar Ekonomi Sekolah Dasar Berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013**

Kelas	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
III	2.4 Mengetahui sejarah uang 2.5 Mengetahui penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan	
IV	1.3 Menunjukkan jenis dan persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan setempat  2.1 Mengetahui aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di daerahnya 2.2 Mengetahui pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2.3 Mengetahui perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya	3.1.Mengidentifikasi ... dan pemanfaatan sumber daya alam ...sampai tingkat kabupaten ( <i>materi kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam</i> )  4.1.Menyajikan hasil mengidentifikasi ... dan pemanfaatan sumber daya alam ...sampai tingkat kabupaten 3.2.Mengidentifikasi keragaman ..., ekonomi, .... bangsa Indonesia ( <i>materi keragaman ekonomi</i> ) 4.2.Menyajikan hasil identifikasi keragaman ..., ekonomi, .... bangsa Indonesia  3.3.Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan

Kelas	Kurikulum 2006	Kurikulum 2013
		budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi ( <i>materi ketersediaan sumber-sumber ekonomi, kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, lembaga ekonomi, perniagaan untuk meningkatkan kesejahteraan</i> )
V	1.5 Mengetahui jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia	4.3.Menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi 3.2.Menganalisis ... dan pengaruhnya terhadap pembangunan ....., dan ekonomi masyarakat Indonesia ( <i>materi pembangunan ekonomi</i> ) 4.2.Menyajikan hasil analisis ... dan pengaruhnya terhadap pembangunan ....., dan ekonomi masyarakat Indonesia 3.3.Menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa ( <i>materi kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang</i> ) 4.3.Menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa
VI	3.2 Mengetahui manfaat ekspor dan impor di Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa	3.3.Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, ... dalam lingkup ASEAN ( <i>materi ekspor &amp; impor</i> ) 4.3.Menyajikan hasil analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, ... dalam lingkup ASEAN

Sumber: KTSP 2006 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/MI, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013, Salinan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Silabus Mata Pelajaran IPS SD/MI (2016)

Sebagaimana tampak pada tabel 2, pada Kurikulum 2006 kompetensi dasar ekonomi pada jenjang pendidikan dasar (SD) tidak ditemukan pada kelas I dan II. Kompetensi dasar ekonomi mulai ditemukan pada kelas III – VI. Sementara pada Kurikulum 2013, kompetensi dasar ekonomi ditemukan pada kelas IV – VI. Kompetensi dasar-kompetensi dasar ekonomi pada jenjang pendidikan SD baik pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 setidaknya menginformasikan tentang hal-hal berikut ini.

1) Tuntutan kompetensi pengetahuan yang diharapkan. Pada Kurikulum 2006, seluruh kata kerja untuk kompetensi dasar ekonomi adalah “mengetahui”. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan pengetahuan yang diharapkan dikuasai siswa berada pada tingkatan pengetahuan yang paling rendah (C1). Ditinjau dari dimensi pengetahuan yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah pengetahuan yang bersifat faktual. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik seperti peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacam-

nya. Dalam taksonomi Anderson dan Krathwohl (2001), kata kerja “mengetahui” berarti proses kognitifnya adalah menempatkan pengetahuan tentang sesuatu hal dalam memori jangka panjang sesuai dengan pengetahuan tersebut (misalnya: mengenali tahapan peristiwa penting dalam sejarah uang, dan lain-lain).

Sementara pada Kurikulum 2013, kompetensi dasar terbagi dalam kompetensi pengetahuan (KD dari KI-3) dan kompetensi keterampilan (KD dari KI-4). Rumusan kata kerja untuk kompetensi dasar pengetahuan menunjukkan tingkatan pengetahuan yang diharapkan dikuasai siswa ada pada tingkatan pengetahuan yang paling rendah (C1), seperti penggunaan kata kerja “mengidentifikasi” dan tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi (C4), seperti tampak dalam penggunaan kata kerja “menganalisis”. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan dari kehadiran Kurikulum 2013 yaitu siswa mampu berpikir

tingkat tinggi (*higher order thinking*).

- 2) Muatan pengetahuan pendidikan ekonomi. Muatan pengetahuan pendidikan ekonomi untuk siswa SD pada Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 tampak tidak ada perbedaan yang berarti. Beda untuk keduanya adalah pada Kurikulum 2013 ada tuntutan bagi para siswa untuk memiliki keterampilan menyajikan pengetahuan yang diperolehnya. Muatan pendidikan ekonomi tampak mengarahkan siswa pada pengetahuan ekonomi yang terlalu berat dan abstrak, sehingga hal ini memberatkan bagi siswa SD. Materi ekonomi bahkan secara berulang ditawarkan pada kurikulum jenjang pendidikan berikutnya (SMP dan SMA/SMK).
- 3) Sekuen penawaran kompetensi dasar. Sekuen penawaran kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa tampak tidak tersusun secara runtut. Konsekuensinya adalah materi pembelajaran ekonomi akan diberikan guru secara tidak urut. Kondisi demikian menyebabkan pembelajar ekonomi (siswa) tentu tidak akan mudah dalam mengorganisasikan pengeta-

huannya. Sekedar contoh sederhana untuk kasus ini adalah siswa kelas III diharapkan memiliki kompetensi dasar mengenal sejarah uang dan mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Sekuen kompetensi dasar tersebut tampak terbalik karena seharusnya siswa mengenali kebutuhan/keinginan, sebelum mereka mengenal uang. Hal ini mengingat uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran dalam rangka memenuhi kebutuhan.

b. Guru

- 1) Jumlah guru dan rasio guru – siswa SD

Jumlah guru di Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 2.925.676 orang (guru negeri = 2.205.197 orang dan guru swasta = 720.479 orang). Dari jumlah tersebut jumlah guru SD sebanyak 1.594.925 orang atau 54,51% (guru negeri = 1.499.899 orang dan guru swasta = 145.026 orang). Data terakhir menunjukkan jumlah guru meningkat menjadi 3.015.315 orang (GTT = 721.124 orang dan Guru PNS dan GTY = 2.294.191 orang) (Bahan Tayang Kebijakan Pem-

binaan dan Pengembangan Profesi Guru-BPSDMP-PMP, 2015). Secara keseluruhan, rasio jumlah guru dengan siswa pada tahun 2011 adalah 1:20,29. Artinya, 1 guru mendampingi 20,29 siswa. Dalam Rencana Strategis Depdiknas (2010-2011) memang tampak bahwa rasio ini sangatlah tidak merata untuk berbagai tanah air di Indonesia. Pada provinsi-provinsi tertentu rasio guru dengan siswa sangat baik, seperti ada di Provinsi Maluku (1;11), namun sebaliknya sangat buruk untuk Provinsi Sulawesi Utara (1:54). Secara umum jumlah guru dan rasio guru-siswa dikategorikan baik, meskipun tampak tidak merata untuk setiap daerah di tanah air.

## 2) Kualifikasi pendidikan dan bidang keahlian guru

Pada tahun 2011, kualifikasi pendidikan guru pada semua jenjang sebagai berikut: belum berkualifikasi S-1 sebanyak 1.424.513 (49%) dan sudah berkualifikasi S-1 atau lebih 1.501.163 (51%). Dari jumlah tersebut kemungkinan besar jumlah guru yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S-1 telah menaik secara signifikan sejalan dengan diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, dan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa kualifikasi pendidik untuk jenjang SD/ sederajat minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dihitung mulai tahun 2015. Pada tahun 2011, jumlah guru yang telah bersertifikasi sebanyak 1.102.021 orang atau 37,7%. Data terakhir menunjukkan jumlah guru yang telah tersertifikasi pada rentang tahun 2007-2014 sebanyak 1.579.838 atau 52,39% (Bahan Tayang Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru-BPSDMP-PMP, 2015). Jumlah guru yang bersertifikat tersebut dipastikan bertambah dengan adanya tambahan jumlah guru yang lulus pada sertifikasi guru tahun 2015. Dengan kata lain, sebagian besar guru SD telah berkualifikasi S-1 dan dinyatakan sebagai guru yang profesional jika ditilik dari kepemilikan sertifikat pendidik.

Sebagian besar guru SD adalah guru kelas yang umumnya berlatar belakang lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sebagian lainnya adalah berlatar belakang pendidikan yang cukup bervariasi, seperti lulusan pendidikan sejarah,

pendidikan PKn, pendidikan agama, dan lain-lain. Namun sayangnya jika melihat Kurikulum Prodi PGSD, sebagaimana tampak pada berbagai *website* Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki prodi PGSD, tampak bahwa tidak ada satupun Prodi PGSD yang menawarkan mata kuliah ekonomi secara khusus. Mata kuliah yang bersangkutan pada hanyalah mata kuliah Pendidikan IPS SD 1 atau 2 dengan beban/bobot mata kuliah 3 sks saja. Sedangkan pada kurikulum prodi non pendidikan ekonomi kondisinya mungkin kurang lebih sama. Oleh sebab itu wajar jika para guru merasa kesulitan untuk memahami hal-hal yang penting tentang ekonomi kepada siswa, karena mereka sendiri pun kemungkinan juga akan merasa kesulitan untuk memahaminya.

### c. Kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan seringkali berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Perubahan kurikulum memang bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan mengingat kondisi lingkungan yang terus berubah. Namun, pergantian kurikulum yang tergesa-gesa dan tanpa studi yang mendalam bisa saja menyebabkan kekacauan dalam praktik pendidikan di sekolah. Hal ini

tampak misalnya dalam perubahan dari Kurikulum 2006 (KTSP) ke Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum memang dimaksudkan untuk hal yang baik, seperti dengan memasukkan aspek afektif dan psikomotorik dalam capaian pembelajaran, namun tampaknya kesiapan guru dan sarana prasarana belumlah cukup untuk mendukung penerapannya. Dampaknya para guru mengalami berbagai kesulitan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dan siswa menjadi pihak yang paling dikorbankan dari perubahan kurikulum. Meskipun kurikulum telah berubah, perubahan kurikulum tampak tidak membawa angin segar untuk pendidikan ekonomi di SD yang lebih baik setidaknya sisi jumlah waktu maupun capaian yang diharapkan. Pendidikan ekonomi tetap terintegrasi dalam pendidikan IPS atau bidang keilmuan lain yang dipandang relevan serta ditawarkan dalam jumlah waktu yang tetap.

## 2. **Pembelajar Ekonomi Perlu Me-lek Ekonomi**

Kelangkaan/keterbatasan (*scarcity*) adalah fakta kehidupan

(Dahl, 1998). Keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*) seseorang seringkali melebihi sumber daya yang dimiliki. Pada saat sumber daya yang dimiliki terbatas, mau tidak mau, seseorang harus memikirkan sumber daya mana yang harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan yang ia prioritaskan. Pengambilan keputusan ini acapkali tidak mudah mengingat setiap individu dalam masyarakat memiliki kebutuhan atau pun keinginan yang berbeda-beda. Pengorbanan sumber daya yang dimiliki seseorang seringkali berhubungan dengan upaya pemenuhan keinginan atau kebutuhan orang lain. Hal inilah yang menjadikan persoalan ekonomi menjadi semakin kompleks dan kehadiran ilmu ekonomi dimaksudkan untuk mempelajari dan memberikan jawaban tentang bagaimana individu dan masyarakat seharusnya membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Ada tiga pertanyaan mendasar dalam studi ekonomi (Dahl, 1998): 1) apa barang dan jasa yang akan diproduksi?; 2) bagaimana barang dan jasa akan diproduksi?; dan 3) siapa yang akan mendapatkan hasil akhir? Atas serangkaian pertanyaan ini masyarakat dihadapkan pada pilihan-

pilihan dan di situ pula tampak adanya *trade-off*. Pada masyarakat yang berbeda, mereka akan menjawab serangkaian pertanyaan itu dengan cara yang berbeda. Di banyak negara, mereka menyerahkan kepada pasar untuk menjawab persoalan alokasi sumber daya.

Interaksi antara penawaran dan permintaan dalam suatu pasar membentuk harga. Harga mengirimkan sinyal ke produsen dan konsumen tentang apa yang perlu mereka lakukan. Sementara, pemerintah berperan dalam menentukan apa yang menjadi hak miliknya (*property right*), membangun sistem hukum untuk menyelesaikan segala perselisihan yang kemungkinan muncul, mengaktifkan peran bank sentral dan lembaga keuangan lainnya, dan lain-lain agar pasar bekerja secara efisien. Pemerintah selanjutnya akan menransfer pendapatan dengan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat seperti pertahanan dan keamanan, sarana umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Ada variasi peran pemerintah dalam bidang ekonomi di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, peran

pemerintahnya relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara Eropa dan negara-negara di benua lainnya.

Menurut Dahl (1998), ada enam hal penting yang berhubungan dengan *trade-off* yang dihadapi masyarakat yang perlu dipahami oleh pembelajar ekonomi. Berikut ini disajikan uraiannya.

- a. *There is no such thing as a free lunch.* Setiap orang pasti menghadapi *trade-off*. *Trade-off* yang mereka hadapi beraneka ragam, dari yang sederhana hingga yang bersifat kompleks. Untuk mendapatkan yang diinginkan, setiap orang mau tidak mau harus memberikan sesuatu sebagai imbalannya. Dalam ekonomi, hal demikian dikenal sebagai biaya kesempatan.
- b. *Thinking incrementally.* Adanya *trade-off* tidak serta merta memberitahu seseorang tentang keputusan apa yang terbaik yang dapat ia pilih. Jika setiap orang ingin melakukan yang terbaik/terarah sesuai dengan kepentingannya, maka mereka perlu membuat analisis marjinal (*marginal utility*) untuk setiap pilihan keputusannya.
- c. *Market coordinate consumption and production.* Dengan menga-

sumsikan bahwa produsen dan konsumen melakukan yang terbaik sesuai dengan kepentingan mereka, harga memberikan sinyal bagi masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Harga adalah sinyal untuk mende-finisikan *trade-off* yang dihadapi setiap orang. Memang banyak orang akan merasa tidak puas dengan harga yang terbentuk di pasar, tetapi bagi orang yang me-lek ekonomi mereka akan me-nyadari bahwa harga adalah si-nyal yang mencerminkan peru-bahan mendasar dalam penawa-ran dan permintaan. Dengan kata lain, memahami tentang bagai-mana perubahan penawaran dan permintaan akan mempengaruhi harga merupakan hal yang pen-ting dalam literasi ekonomi.

- d. *Relative price changes guide decision-making.* Untuk melihat bagaimana perubahan harga akan mengubah *trade-off*, maka perlu memperhatikan perubahan tingkat harga secara keseluruhan. Kemampuan untuk membedakan perubahan harga secara relatif

dan perubahan tingkat harga se-cara keseluruhan ini dipandang sebagai hal yang penting dalam literasi ekonomi.

Harga yang stabil, tanpa inflasi atau deflasi, mencerminkan suatu keadaan ekonomi dan juga memberikan informasi perubahan harga secara relatif dan secara keseluruhan. Pada kondisi ekonomi yang normal, kestabilan harga berhubungan dengan peran bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Mengingat hal demikian, penting bagi setiap pembelajar ekonomi memahami peran bank sentral dalam kegiatan perekonomian.

- e. *Trade promote growth.* Perdagangan adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Perdagangan memungkinkan setiap negara mengambil keuntungan dari spesialisasi dan *trade-off* yang dihadapi masyarakat. Dengan melakukan spesialisasi, setiap negara dapat melakukan usaha terbaik untuk yang dapat mereka buat. Hal demikian memberikan keuntungan bagi masyarakat: pertama, berbagai macam barang dan jasa tersedia di pasar; dan kedua, barang dan jasa tersedia de-

ngan biaya yang lebih rendah. Per-tumbuhan perdagangan mendorong persaingan antar produsen, me-mungkinkan negara menciptakan keunggulan komparatif, dan me-ningkatkan standar hidup masyarakat di berbagai tempat.

- f. *Markets can fail.* Pemerintah seharusnya mengevaluasi apakah mereka perlu melakukan campur tangan dalam perekonomian ataukah tidak. Pemerintah perlu melakukan inter-vensi, jika pasar tidak bekerja se-cara efisien atau pasar mengalami kegagalan. Di beberapa pasar, baik pembeli dan penjual, kemungkinan tidak memiliki informasi yang lengkap sehingga perdagangan menjadi terdistorsi. Pemerintah, karenanya, dapat memaksa produsen untuk me-ngungkapkan detail informasi pro-duknya agar memudahkan konsu-men membuat pilihan dan menga-mbil keputusan. Pemerintah juga dapat mengatur produsen untuk membatasi jumlah *output* agar harga di pasar dapat terbentuk secara wajar. Jika tidak atau

kondisi di-biarkan begitu saja, barang akan ter-sedia di pasar terlalu sedikit atau terlalu banyak. Pasar mungkin gagal dalam menggambarkan biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga, misalnya polusi udara yang ditimbulkan dari proses produksi. Pemerintah, karenanya, perlu melakukan intervensi dalam negosiasi antara produsen dan masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjamin distribusi pendapatan untuk kepentingan sosial, yaitu kompensasi bagi setiap orang sesuai dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan atau membeli barang/jasa, dan menetapkan besaran pajak penghasilan dan berbagai program bantuan pemerintah lainnya untuk masyarakat. Peran pemerintah tersebut memiliki dampak besar pada kinerja ekonomi secara keseluruhan, meskipun campur tangan pemerintah tidak selalu mampu meningkatkan kinerja pasar. Mengingat hal demikian, setiap orang perlu belajar dan mengetahui bagaimana dan kapan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi kondisi pasar. Seorang melek ekonomi tidak

berarti akan selalu setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi mereka setidaknya terbantu untuk memahami *trade-off* atas apa yang dipertukarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, memahami peran pemerintah dalam menangani fluktuasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam melek ekonomi.

Keberadaan keenam hal di atas bukanlah dalam sebuah ruang yang hampa. Setiap orang perlu mempelajari berbagai bidang lainnya dan terus memperhatikan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Siapapun dapat membuat keputusan ekonomi bahkan tanpa harus memahami hal-hal penting tentang ekonomi. Keputusan mereka pun bisa jadi tepat, asalkan mereka melakukan upaya/tindakan terbaik yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Lalu, mengapa melek ekonomi tetap masih diperlukan? Melek ekonomi akan mempertajam kemampuan analisis setiap orang terhadap berbagai pilihan yang dihadapinya. Faktanya, *trade-off* yang dihadapi semua orang semakin kompleks dan oleh karenanya membuat keputusan

ekonomi juga bu-kan perkara yang mudah. Melek eko-nomi dibutuhkan agar setiap orang da-pat membuat keputusan yang terbaik, baik sebagai pribadi maupun warga negara. Untuk itulah, setiap pembelajar ekonomi semestinya melek ekonomi.

### **3. Pentingnya pendidikan ekonomi bagi siswa SD**

Stigler (1970), peraih Nobel Laureate di bidang ekonomi, mengatakan, *"the public has chosen to speak and vote on economic problems, so the only open question is how intelligently it speaks and votes."* Pernyataan Stigler (1970) ini menunjukkan dua hal penting: pertama, pengetahuan ekonomi berfungsi sebagai alat komunikasi di antara orang-orang dan logika berpikir ekonomi yang seharusnya mereka miliki; kedua, pengetahuan ekonomi adalah jenis pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat dan bukan semata menjadi konsumsi para ahli.

Pengetahuan ekonomi menjadi alat untuk memahami dunia ekonomi yang dihadapi setiap orang dan membantu mereka menafsirkan apakah peristiwa ekonomi tersebut secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Jika jumlah

anggota masyarakat yang berpengeta-huan ekonomi semakin banyak, maka hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk memahami dan me-ngevaluasi permasalahan-permasalah-an ekonomi suatu bangsa. Pada bangsa yang semakin demokratis, dukungan dan keterlibatan aktif dari warganya adalah penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang mendera bangsa (Wastald, 1998).

Ada banyak ragam pengambilan keputusan ekonomi yang dibuat setiap orang secara individual ataupun meminta bantuan orang lain. Pengambilan keputusan ekonomi, seperti membeli rumah atau berinvestasi di pasar saham, memang dapat meminta bantuan seorang yang profesional di bidangnya. Namun, jika setiap pengambilan keputusan ekonomi harus melibatkan mereka, maka hal tersebut jelas tidak ekonomis dan praktis. Biaya untuk membayar konsultan tidaklah murah, sementara saran mereka juga tidak selalu dapat dipastikan benar-benar tepat. Jauh lebih penting dari itu, keputusan final ada di tangan yang bersangkutan dan seseorang mau atau tidak mau harus

pula siap dengan segala risikonya. Konsultan tidak berarti tidak penting, tetapi sangat baik jika setiap orang menjadi ekonom bagi dirinya sendiri khususnya untuk hal-hal sederhana. Dengan kata lain literasi ekonomi penting bagi setiap orang. Literasi ekonomi akan meningkatkan kompetensi seseorang dalam keputusan pribadi ataupun bersama terhadap berbagai pilihan/permasalahan ekonomi yang dihadapi sepanjang umur hidupnya.

Menurut Stigler (1970), pendidikan ekonomi idealnya dimulai sejak anak masuk sekolah. Guru pendidikan dasar, karenanya, harus mendampingi anak-anak belajar secara benar tentang konsep-konsep dasar ekonomi. Jika anak-anak mampu menguasainya, maka hal itu akan membantu mereka memahami tentang dunia ekonomi yang ada di sekitarnya. Pada tahap selanjutnya materi pembelajaran ekonomi dapat diperluas dan diperdalam secara bertahap sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Keluasan dan kedalaman materi yang diterima siswa akan memberikan bekal kemampuan yang lebih besar bagi mereka untuk memahami permasalahan ekonomi yang lebih

kompleks dan kemampuan dalam mengambil keputusan ekonomi baik sebagai pribadi maupun warga negara.

Studi Wastald (1998) terhadap siswa SMA di Amerika Serikat menemukan bahwa kurang dari 40% siswa yang mampu menjawab secara benar tentang istilah-istilah ekonomi, konsep-konsep dasar ekonomi yang penting untuk memahami suatu peristiwa ekonomi, dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang dilaporkan di media massa. Atas rendahnya capaian tersebut para siswa beralasan bahwa mereka tidak mendapatkan bekal pengetahuan ekonomi yang cukup di sekolah. Berdasarkan temuannya ini, Wastald (1998) menuliskan kegelisahannya sebagai berikut: *"some may think that economics is too difficult a subject to be taught to children and youth, and that such instruction should wait until college. Nothing could be more incorrect"*.

Di Indonesia, beberapa temuan penelitian juga menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan. Temuan hasil survei VISA (2012) dan temuan penelitian Chen dan Volpe (1998)

se-bagaimana diuraikan pada latar bagian pendahuluan tulisan ini memberikan bukti atas rendahnya hasil pendidikan ekonomi. Temuan-temuan lain berikut ini juga menggambarkan keadaan yang sama: 1) *Worldbank* (2011), misalnya, melaporkan tentang tingkat akses masyarakat ke lembaga keuangan formal (bank dan lembaga keuangan lainnya). Tingkat akses masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal kurang lebih hanyalah 20%. Tingkat akses ini menempatkan Indonesia pada posisi buncit dari enam negara Asia yang diteliti; 2) Penelitian Nababan dan Sadalia (2012) terhadap mahasiswa S-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara menunjukkan bukti bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa sebesar 56,61% (skor tersebut dikategorikan skor yang rendah); 3) Penelitian Ni-dar dan Bestari (2012) terhadap mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan yang rendah; dan 4) Penelitian Margaretha dan Pambudhi (2015) juga menunjukkan bukti rendahnya tingkat literasi keuangan mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (hanya 48,91% pertanyaan yang dijawab

secara benar). Literasi keuangan adalah bagian dari literasi ekonomi. Namun demikian, temuan-temuan tersebut kiranya memberikan potret yang tidak menggembirakan untuk tingkat literasi ekonomi dari masyarakat kita.

Gambaran temuan di atas menunjukkan adanya keterlambatan dan kegagalan dalam pendidikan ekonomi. Upaya perbaikannya akhirnya tidak mudah. Lebih-lebih sangatlah banyak peserta didik yang tidak mampu melanjutkan studi ke PT, sementara yang berkemampuan pun juga sangat banyak yang lebih memilih jurusan non ekonomi. Karenanya, kesempatan terbaik untuk memberikan pendidikan ekonomi adalah saat mereka masih anak-anak dan remaja (Wastald, 1998). Menurut Wastald (1998), jika sejak anak-anak telah belajar konsep dasar ekonomi dengan benar, maka hal itu akan membantu mereka memahami dunia ekonomi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan membuat keputusan tentang apa yang harus dibeli, berapa banyak dari pendapatan mereka yang harus dibelanjakan, berapa banyak jumlah yang harus disimpan untuk masa depan mereka,

dan lain-lain. Sebagai warga negara, mereka juga perlu bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, semisal kebijakan fiskal dan moneter, dan mengambil keputusan yang tepat sebagai konsumen, produsen, penabung, dan lainnya.

Saat telah menjadi orang dewasa, setiap orang akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan ekonomi yang lebih kompleks dan memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat, entah benar atau tidak, akan mempengaruhi kehidupan mereka dan orang lain (Meszaros dan Suiter, 1988). Tobin (1986), pemenang Nobel pada tahun 1981, mengingatkan bahwa setelah lulus SMA seseorang harus mengambil keputusan terhadap pilihan-pilihan ekonomi yang akan menentukan kehidupan mereka, baik sebagai pencari nafkah, konsumen, maupun warga negara. Setiap waktu mereka dibombardir berbagai macam informasi ekonomi dan mereka harus memiliki kapasitas untuk membuat keputusan secara kritis. Oleh karenanya, jika memang ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat dan pemahaman tentang ekonomi dianggap sebagai hal yang penting untuk membantu setiap

orang membuat keputusan yang menentukan masa depannya, maka pertanyaannya adalah mengapa ekonomi tidak diajarkan secara memadai di sekolah-sekolah dan dimulai sejak anak menempuh pendidikan jenjang SD?

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan untuk menyelenggarakan pendidikan ekonomi yang efektif di sekolah-sekolah (Wastald, 1998). Pertama, guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi agar dapat membantu siswa belajar tentang bagaimana menggunakan konsep-konsep dasar ekonomi untuk menganalisis masalah-masalah pribadi dan sosial yang dihadapinya; kedua, panduan kurikulum dan bahan ajar yang baik sesuai dengan tingkatan siswa, dan ketiga, pendidikan ekonomi harus memiliki tempat sentral dalam kurikulum di sekolah sama seperti pelajaran lain, seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya.

## **PEMBAHASAN**

(Gagasan tentang pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi di SD)

## 1. Pengembangan kurikulum SD dan sumber-sumber belajar

### a. Pengembangan kurikulum di SD

Dalam Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 tampak nyata bahwa pendidikan ekonomi melalui jalur formal (persekolahan) belum diperhatikan oleh pemerintah. Hingga saat ini mata pelajaran ekonomi tidak pernah berdiri sendiri dan diberikan waktu yang cukup. Jikalau harus digabung dengan mata pelajaran IPS semestinya mata pelajaran tersebut diberikan tambahan jumlah jam pertemuan dan koreksi atas muatan pendidikan ekonomi. Hal ini mengingatkan pendidikan ekonomi pada tingkat dasar harus memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang membuat mereka mulai melek ekonomi.

Tujuan akhir pendidikan ekonomi pada setiap jenjang pendidikan haruslah jelas dan terukur. Selanjutnya SK dan KD pada setiap jenjang kelas, perangkat pembelajaran, dan hal-hal lainnya dibuat dengan memperhatikan tingkat relevansinya dengan tujuan ditetapkan. Kurikulum yang disusun lengkap oleh Day dan Ballard (1996) dari *Indiana Department of Education* yang berjudul *"The Classroom Mini-*

*Economy: In-tegrating Economics into Elementary and Middle School Curri-culum"* dan *National Council on Economic Edu-cation's* (NCEE) adalah dua dari ba-nyak contoh yang mungkin dapat menjadi alternatif referensi untuk dilakukannya perubahan kurikulum pendidikan ekonomi.

Gagasan di atas disadari memang tidak mudah untuk direalisasi, mengi-ngat literasi ekonomi bagi pembelajar SD belum/tidak pernah menjadi gerak-an bersama secara nasional. Di samping itu, kebijakan pendidikan sangat tergan-tung pada kehendak kementerian pen-didikan. Namun demikian tidak ada sa-lah dan kata terlambat untuk mengu-sulkan perubahan kebijakan pendidi-kan yang memungkinkan ide-ide di atas diakomodasi.

Kemungkinan lain yang dapat di-lakukan untuk meningkatkan literasi ekonomi adalah melalui kegiatan-kegi-atan yang bersifat kokurikuler. Seko-lah dapat menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelengga-rakan kursus/pelatihan literasi ekono-mi bagi siswa SD.

Kursus/pelatihan ini dilakukan di luar jam pelajaran. Selu-ruh siswa dapat diwajibkan untuk me-ngikuti pelatihan/kursus tersebut seba-gai salah satu persyaratan kelulusan mereka. Sekolah juga dapat menyele-nggarakan berbagai kegiatan untuk ke-pentingan peningkatan literasi ekono-mi, seperti menghidupkan kembali usa-ha-usaha perekonomian di sekolah, me-numbuhkan spirit berkoperasi/berwira-usaha, dan menginspirasi usaha-usaha produktif di kalangan siswa dengan me-manfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya.

b. Penyediaan sumber-sumber belajar yang kontekstual

Ketersediaan sumber bahan ajar untuk pendidikan ekonomi saat ini memang banyak. Di antara sumber-sumber belajar, buku tekslah yang umumnya diandalkan guru satu-satunya sebagai sumber pembelajaran. Jika tidak ada buku teks, maka umumnya guru kesulitan menyelenggarakan proses belajar mengajar di kelas. Pelaksanaan Kuri-kulum 2013 adalah contohnya, ketika buku buku teks belum tersedia, guru seolah tak berdaya untuk me-nyelenggarakan pembelajaran. Sum-ber bahan ajar berupa buku (terma-suk dari Kemendikbud), meski telah tersedia

banyak guru perlu secara se-lektif dalam memilih yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Hal demi-kian mengingat konten materi dalam buku tidaklah selalu benar. Di sam-ping itu, umumnya buku teks disa-jikan dalam bentuk uraian panjang dan bahasa yang tidak selalu mudah untuk dicerna siswa. Sumber belajar demikian jelas tidak akan menarik minat siswa. Sangat baik jika buku disajikan dengan memperhatikan du-nia anak, seperti komik atau cerita bergambar lainnya dengan mengha-dirkan tokoh-tokoh kartun/film yang umumnya mereka kenal/sukai. Jika buku dengan ciri demikian belum tersedia, maka sebenarnya guru atau siapapun berpeluang untuk membuat buku tersebut.

Ketersediaan sumber-sumber belajar lainnya (koran, majalah, jur-nal, internet, dll) juga menjadi suatu keharusan untuk ada di sekolah. Na-mun ketersediaan berbagai sumber pembelajaran tersebut tidaklah cu-kup, pelaksanaan pembelajaran yang baik di kelas adalah kunci keberha-silan pembelajaran ekonomi di kelas. Guru ditantang untuk dapat mende-sain pembelajaran yang tepat sesuai

konteks pembelajaran. Hal demikian disebabkan teknik-teknik dan strategi pembelajaran yang tepat akan jauh lebih bermanfaat bagi siswa. Para siswa tidak hanya menjadi lebih ter-tarik terhadap subjek pembelajaran, tetapi mereka juga lebih menguasai materi pembelajaran sehingga mereka tertantang untuk memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakatnya (Dawood, 2006).

## **2. Peningkatan kapasitas guru kelas tentang literasi ekonomi**

Guru adalah "sopir" yang akan mengantarkan "para penumpang" kepada tujuan pendidikan (Anita Lie dalam Kompas, 26 Februari 2013). Sebagian besar guru SD adalah guru kelas yang umumnya lulusan PGSD. Menilik kurikulum PGSD dari berbagai universitas atau sekolah tinggi yang memiliki program studi PGSD, tampak nyata bahwa lulusan umumnya mendapatkan bekal pengetahuan ekonomi yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, perlu dijalankan program literasi ekonomi bagi guru-guru SD. Penyelenggara program literasi ekonomi bisa lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas atau sekolah tinggi ilmu ekonomi, yang memang memiliki kepedulian terhadap masalah buruknya pendidikan ekonomi

di jenjang pendidikan dasar. Program tersebut bisa dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya dapat diusulkan ke Dikti dalam skema hibah pengabdian kepada masyarakat atau skema hibah desentralisasi.

Literasi ekonomi bagi guru SD dapat difokuskan pada pemberian kur-sus/pelatihan tentang bagaimana me-ngajarkan ekonomi yang benar di SD (Meszaros dan Suiter, 1998). Materi dan model kegiatan pelatihan dapat me-niru yang telah dibuat oleh *National Council on Economic Education's (NCEE) network* tetapi dengan mem-perhatikan karakter khas ke-indonesia-an. Jaringan ini mencakup lebih dari 250 pusat pendidikan ekonomi di kam-pus-kampus seluruh Amerika Serikat. Setiap kampus menawarkan menu kur-sus pendidikan ekonomi bagi guru. Pe-ngetahuan tentang ekonomi yang di-peroleh guru dari kursus, bukanlah di-maksudkan untuk mengajar ilmu ekonomi di kelas mereka. Tetapi, be-kal pengetahuan yang diperoleh dari kursus/pelatihan diharapkan akan meningkatkan tingkat kenyamanan guru dalam

mengajar, khususnya jika materi pembelajaran yang bertautan dengan ekonomi.

Hasil penelitian Becker dan Hallows (1994) menemukan bahwa pada kebanyakan studi program ekonomi telah diikuti guru memiliki dampak yang signifikan terhadap pengetahuan guru dan pada akhirnya berimbas pula pada pengetahuan siswa. Guru ekonomi perlu memahami dan mampu menjawab kebingungan peserta didik tentang konsep-konsep ekonomi yang mereka bawa dari rumah dan masyarakat (Schug dan Walstad, 1991). Kegagalan guru dalam mengatasi kebingungan peserta didik akan menghasilkan kesalahpahaman ekonomi yang kemungkinan akan bertahan lama dan bahkan menetap sampai peserta didik memasuki masa dewasa (Schug, 1994).

### **3. Peningkatan kapasitas siswa sebagai pembelajar ekonomi**

#### **a. Menumbuhkan spirit berkoperasi di sekolah melalui koperasi siswa**

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini antara lain: mendirikan koperasi siswa dan mengadakan pelatihan berkoperasi bagi siswa, guru, dan orang tua siswa. Siswa

mungkin belum dapat mengelola usaha, karenanya pengelolaan kegiatan ini bisa dilakukan secara bersama oleh guru, karyawan, dan komite sekolah (orang tua). Jika koperasi ini adalah koperasi konsumsi, misalnya, barang-barang yang umumnya diperlukan siswa dapat diidentifikasi.

Guru/karyawan/orang tua yang berkesediaan menyediakan barang sesuai spesialisasinya dapat dilakukan pendataan dan pengaturan. Sementara siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai anggota koperasi yang aktif. Mereka dididik, sesuai dengan kemampuannya, agar mampu menyisihkan uang jajan untuk simpanan wajib atau suka rela dan mereka tertib melakukan kewajibannya tersebut. Jumlah yang dikonsumsi siswa perlu dibatasi, agar anak juga terlatih menggunakan uang sesuai kebutuhan mereka. Oleh karenanya, perlu ada catatan pada setiap anak atas pengeluaran uang yang mereka belanjakan di koperasi. Anak-anak tidak diperkenankan untuk melakukan pengeluaran berlebih, karena menyebabkan hilangnya kesempatan anak lain

untuk memenuhi kebutuhannya. Pengurus koperasi (para guru dan komite sekolah) juga perlu kreatif dalam melakukan pemberdayaan kepada anggota koperasi (siswa), misalnya melalui program kreativitas siswa, pelatihan berwirakoperasi kepada para siswa, dan lain-lain.

Pada akhir tahun, anak-anak diajak untuk rapat anggota. Mereka akan menerima SHU sesuai dengan jumlah pengorbanan masing-masing. Pada saat lulus, simpanan wajib dan suka-rela, serta hasil-hasil lainnya dibagikan kepada siswa. Uang tersebut dapat menjadi modal bagi mereka untuk meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan cara demikian, sedari dini anak terlatih berkoperasi, memandang penting bahwa koperasi memberikan kemanfaatan dalam kehidupan mereka, dan utamanya mereka melekat ekonomi meski dalam perkara yang sederhana.

b. Menghidupkan kembali kegiatan produktif siswa melalui “warung hidup”, “dokter kecil”, dan lain-lain.

Pengalaman mengelola kegiatan produktif memiliki peran strategis manakala siswa harus mampu mandiri secara ekonomi saat mereka nanti

beranjak dewasa. Siswa dilatih untuk dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Kiranya menjadi penting mengajak siswa mengenali potensi sumber daya yang ada di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengusahakan “warung hidup” dengan mengajak siswa berkebutuhan adalah salah satu cara yang dapat ditempuh. Melalui kegiatan ini, bukan saja manfaat mengenali potensi sekitar yang didapatkan siswa, namun lebih dari itu siswa memanfaatkan hasil-hasilnya. Oleh karenanya, kegiatan “warung hidup” dapat dikaitkan dengan kegiatan “lomba memasak” dengan memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan “warung hidup”. Melalui kegiatan “warung hidup” ini, siswa sebenarnya secara tidak langsung diajak untuk melaksanakan pendidikan karakter dalam arti yang sesungguhnya. Setiap siswa pasti akan bekerja sama dengan teman yang lain, akan muncul tanggung jawab, mulai memiliki keberanian mengungkapkan ide dan gagasan, menghargai pendapat dan pe-

kerjaan orang lain, dan lain sebagainya.

Kegiatan “dokter kecil” juga memberikan kemanfaatan bagi para siswa. Melalui kegiatan ini siswa memiliki pengetahuan tentang bagaimana menangani diri sendiri dan orang lain yang membutuhkan per-tolongan, mengenali berbagai macam obat-obatan dan kegunaannya, dan lain sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut penting dimiliki siswa sejak dini, agar mereka dapat menangani sendiri persoalan sederhana yang dihadapinya, praktis tanpa harus bergantung pada orang lain, dan secara ekonomi menghemat pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.

c. Studi trip ke lembaga keuangan seperti koperasi, *credit union* (CU), bank, dan berbagai lembaga keuangan lain.

Studi trip dapat dilakukan untuk memberi wawasan kepada para siswa tentang bagaimana peran lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wawasan tentang hal-hal tersebut secara langsung akan meningkatkan *economic/financial literacy* dan menjadi modal sangat berharga bagi mereka dalam

mengambil keputusan-keputusan eko-nomi.

d. Menghadirkan guru tamu atau seorang profesional mengajar di kelas

Selain mengajak siswa berkunjung ke koperasi, CU, atau lembaga keuangan, sekolah juga dapat mendatangkan praktisi/pelaku ekonomi ke kelas sesuai dengan topik/materi pembelajaran. Para praktisi diminta untuk membagikan pengalamannya dalam bekerja atau mengelola usaha. Dalam banyak praktik, kegiatan ini di samping memberikan tambahan wawasan bagi siswa, juga memberikan tambahan motivasi bagi siswa untuk belajar secara lebih serius.

e. Meningkatkan kreativitas siswa melalui “mini ekonomi”

Di beberapa sekolah luar negeri, seperti di Indiana, siswa diminta untuk menghadirkan kegiatan ekonomi dalam kelas. Siswa secara berkelompok diminta untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi kecil-kecilan atau “mini ekonomi”. Bentuknya semacam “toko kecil”. Mereka diminta untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi peluang usaha di kelas dan

menetapkan hal yang paling mungkin dapat dilakukannya dalam kelas itu. Kegiatan ini diselenggarakan di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Setiap kelompok wajib membuat laporan dari awal hingga akhir tentang apa yang dikerjakannya. Pada akhir semester mereka wajib mengumpulkan laporan kepada guru. Guru selanjutnya memberikan penilaian tentang apa yang mereka lakukan dan seberapa kreatif ide yang mereka buat. Kegiatan ini sebenarnya juga sebagai sarana bagi siswa untuk berlatih berwirausaha sejak usia dini.

f. Meningkatkan sikap kritis siswa

1) Upaya meningkatkan sikap kritis mahasiswa dalam rangka meningkatkan melek ekonomi siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya lomba membuat poster, lomba menulis tentang permasalahan ekonomi, debat, dan lain sebagainya. Lomba diselenggarakan dalam lingkup sekolah dan diprakarsai oleh guru-guru ekonomi. Penilaian dilakukan pada setiap jenjang kelas atau dibedakan antara siswa dari kelas yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Tema-tema dipilih adalah yang

sedang menjadi isu/ topik ekonomi yang hangat diperbincangkan di masyarakat. Pada jenjang SD, lomba poster sangat mungkin dapat dilakukan, sementara di jenjang SMP di samping lomba poster, lomba menulis esai tentang permasalahan ekonomi, lomba debat atau yang lainnya. Dalam lomba tersebut dilakukan penilaian secara objektif berdasarkan derajat kritisitas mereka dalam menyampaikan kritik/ide atau gagasan/solusi yang ditawarkan/dan lainnya.

2) Kegiatan “majalah dinding” dapat dihidupkan kembali sebagai wahana memupuk kreativitas dan meningkatkan daya pikir siswa. Kegiatan “majalah dinding” tentu perlu diarahkan sedemikian rupa, bukan hanya sekedar ruang menempelkan/menyalin berita atau apapun, tetapi ruang/sarana siswa untuk menuliskan ide/gagasan secara tertulis dan bebas tentang tema tertentu termasuk tema yang berhubungan dengan ekonomi. Karya “majalah dinding” siswa antar

kelas selanjutnya juga dapat dilombakan, dinilai mana yang paling baik, dan layak untuk diberi penghargaan.

- 3) Kegiatan ilmiah siswa bidang studi IPS (ekonomi), seperti penelitian, perlu dilakukan, dihidupi jika sudah ada, dan dikelola dengan lebih baik. Dari sejak dini, siswa perlu dikenalkan kegiatan penelitian, meskipun untuk topik-topik sederhana yang berhubungan dengan materi pembelajaran ekonomi. Mereka perlu mulai diajak berpikir secara ilmiah mulai dari merumuskan permasalahan, bagaimana melakukan mengumpulkan data, menganalisis dan membahas hasil temuan di lapangan, dan membuat laporan. Laporan penelitian bisa dipresentasikan dan bagi yang terbaik diberikan apresiasi. Belum banyak sekolah di Indonesia yang menjadikan dirinya sebagai *research school* karena umumnya kepala sekolah dan para guru terjebak dalam kegiatan administratif persekolahan.

#### **4. Peninjauan kurikulum calon guru SD**

Hasil riset Harsoyo dan Saptono (2016) tentang literasi ekonomi calon

guru ekonomi, yaitu mahasiswa pendi-dikan ekonomi di Yogyakarta, menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi calon guru ekonomi dikategori-kan cukup (rerata 55 dari skala 0 – 100). Hasil riset ini jelas mempriha-tinkan mengingat sebagai calon guru ekonomi mereka semestinya memi-likli pengetahuan akademik yang me-madai. Sisi lain dari riset ini kiranya demikian, mahasiswa yang belajar untuk mengajar hal yang spesifik sa-ja tampak tidak mudah apalagi mahasiswa yang belajar multidisiplin sementara dituntut untuk mampu mengajar materi ekonomi dengan penuh kedalaman.

Perubahan kurikulum PGSD memang tidak mudah untuk dilakukan. Menambah jumlah sks mata kuliah IPS atau memunculkan mata kuliah Pengantar Ekonomi dalam jumlah sks yang cukup jelas akan berdampak pada pengurangan sks atau penghapusan mata kuliah lainnya. Dalam praktik, hal demikian dapat menyebabkan ketegangan di antara dosen prodi. Namun jika menilik hasil-hasil riset yang menunjukkan keadaan literasi ekonomi masyarakat

yang memprihatinkan, semestinya hal itu perlu dilakukan.

Alternatif lainnya adalah memberikan kursus literasi ekonomi bagi para mahasiswa PGSD. Kursus tersebut dapat diberikan di luar jam perkuliahan, namun sifatnya wajib diikuti mahasiswa. Mahasiswa wajib lulus atau menamatkan kursus tersebut sebagai prasyarat untuk kelulusan studi di PGSD. Kursus dapat dilakukan PT dengan menggandeng OJK atau diampu oleh dosen atau praktisi yang kompeten dibidangnya. Dengan cara demikian, calon-calon guru SD diharapkan memiliki bekal yang baik saat mereka mengajar di sekolah.

## KESIMPULAN

Literasi ekonomi menjadi bagian penting dalam pembelajaran ekonomi. Melalui literasi ekonomi, seseorang dapat mengambil keputusan ekonomi yang rasional sesuai dengan pilihan-pilihannya dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pendidikan dasar merupakan tempat yang baik untuk menyemai benih bagi tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perilaku ekonomi yang rasional dan kebijakan dalam menyikapi kehidupan. Pendidikan di SD

memang saat ini belum menjadi tempat yang baik bagi tumbuhnya benih ke-sadaran berperilaku ekonomi. Karenanya, pendidikan ekonomi di pendidikan dasar perlu dilakukan perbaikan setidaknya dalam 3 hal penting: guru, kurikulum dan bahan, dan struktur kurikulum. Guru haruslah profesional dalam artian sesungguhnya; muatan kurikulum hendaknya mengarahkan peserta didik agar melek ekonomi; sekuen penawaran materi pelajaran harus ber-kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ekonomi; sumber pembelajaran perlu disediakan bukan hanya dalam jumlah cukup, tetapi kontennya haruslah benar dan tersaji menarik; dan struktur kurikulum yang memberikan porsi pendidikan ekonomi lebih besar. Gagasan sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini mungkin bukanlah hal baru, namun demikian menilik kondisi melek ekonomi para pembelajar ekonomi yang hingga saat ini masih rendah, gagasan tersebut baik juga untuk direalisasi.

## DAFTAR RUJUKAN

Anderson, L.W., dan Krathwohl, D.R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and*

- Assesing: A Revi-sion of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BP SDMP-PMP). (2015). "Ke-bijakan Pembinaan dan Pe-ngembangan Profesi Guru". *Bahan Tayang*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Becker, William., Karen Hallow. (1994). "What Works and What Doesn't: A Practitioner's Guide to Research Findings in Economic Education". *The In-ternational Journal of Social Education*. Vol. 8 (Winter 1993-94) hal. 87-95.
- Bethune, J.J. (2000). "Assesing Eco-nomic Understanding in The Early Grades". *Journal of Eco-nomics and Economic Edu-cation Research*. Vol. 1 hal. 22-30
- Chen, H., R.P. Volpe. (1998). "An Analysis of Financial Literacy among College Students". *Fi-nancial Services Review*, Vol. 7 (1) hal. 107-128
- Dahl, David S. (1998). "What John-ny Can't Choose". Diunduh 2 Oktober 2015 tersedia di <https://www.minneapolisfed.org/publications/theregion/thenet-the-coming-revolution-in-te-aching-economics#>
- Day, Harlan R., David Ballard. (1996). *The Classroom Mini-Economy: Integrating Econo-mics into Elementary and Middle School Curriculum*. Indiana Department of Educa-tion: Center for School Improvement and Performance Office of Program Development
- Davies, P. (2006). "Educating Citizens for Changing Economies". *Jour-nal of Curriculum Studies*. Vol. 38 No. 1 hal 15-30
- Dawood, Ray. (2006). "Using Instruc-tional Games to Increase Student Learning and Enjoyment in a High School Government Class". *A Masters Project for ED 7999*. Submitted to the Office of Gra-duate Studies, Graduate Division of Wayne State University, De-troit, Michigan in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Teaching.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Kurikulum Tingkat Satu-an Pendidikan (KTSP) SMP*. Ja-karta
- Dumke, G.S. (1977). "New Dimension to Economic Education". *Trust for Educational Leadership*. Vol. 6 No. 3 hal. 25-37
- Harsoyo, Y., L. Saptono. (2016). "Tingkat Literasi Ekonomi Calon Guru Ekonomi di Provinsi Da-erah Istimewa Yogyakarta". *Ha-sil Penelitian*. Yogyakarta: Uni-versitas Sanata Dharma
- Jappeli, T. (2010). "Economic Literacy: An International Comparasion". *The Economic Journal*. Vol. 120 F429-F451

- Johnson, T. (1979). "Research on Economic Education – How well is it Answering the Question Asked". *American Economic Review*. Vol. 69 (2) hal. 22-27
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Silabus Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)*. Jakarta
- Lie, Anita. 2013 "Kurikulum sebagai Kendaraan". Tersedia di *Harian Kompas*, 26 Februari 2013
- Lo, M., M.C. Wong., F.G. Mixon. (2008). "Ranking Economics Journals, Departments, and Economists Using Teaching-Focused Research Productivity". *Southern Economic Journal*. Vol. 74 no. 3 hal 894 -906
- Lucey, T.A., G.M. Giannangelo. (2006). "Short Changed: The Importance of Facilitating Equitable Financial Education in Urban Society". *Education and Urban Society*. Vol. 38 No.3 hal 268-287
- Ma, B.K., J.H. Weiss. (2009). "A Variance Decomposition in The Evaluation of The Effect of Educational Policies in Economic Education". *Applied Economics Letters*. Vol.16 No. 3 hal. 239-242
- Margaretha, Farah., Reza Arief Pamudhi. (2015). "Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 17 No. 1 Maret hal. 76-85
- Marlin, J.W., J.J. Durden. (1993). "An Analysis of Contributions and Contributors in Economic Education". Vol. 24 (2) hal. 171-186
- Meszaros, Bonnie., Mary Suiter. (1998). "The Case for Economics in the Elementary Classroom". Diunduh 2 Oktober 2015 tersedia di <https://www.minneapolisfed.org/publications/the-regi-on/the-net-the-coming-revolution-in-teaching-economics#>
- Nababan, D., I. Sadalia. (2012). "Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara". Di-unduh 1 Oktober 2015 dari <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/34557>
- Nidar, S.R., S. Bestari. (2012). "Personal Literacy among University Students: Case Study at Padjadjaran University Students, Bandung, Indonesia". *World Journal of Social Sciences*. Vol. 2 (4) hal. 162-171
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2005). *Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies*. Paris: OECD
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 64 Tahun 2013 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 67 Tahun 2013 tentang *Kerangka dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 tentang *Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Schug, Mark C., William Walstad. (1991) "Teaching and Learning Economics," *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*, ed. J. Shaver New York: Macmillan.
- Schug, Mark C. (1994). "How Children Learn Economics". *The International Journal of Social Education*. Vol. 8 (Winter 1993-94) hal. 25-34
- Soper, J.C., W.B. Wastald. (1991). "Economic Knowledge in Junior High and Elementary Schools". Dalam W.B. Was-tald dan J.C. Soper (eds). *Effective Economic Education in The Scholls*. Washington D.C. The Joint Council on Economic Education and The National Education Association.
- Stigler, George J. (1970). "The Case, if Any, for Economic Literacy," *Journal of Economic Education*, 1:2, 77-84.
- Stigler, G.J. (1983). "The Case, if Any, for Economic Literacy". *Journal of Curriculum Studies*. Vol. 38 No. 1 hal. 15-30
- Tobin, James. (1986). "Economic Literacy Isn't Marginal Investment," *Wall Street Journal*. 9 July
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Varum, Celeste., Abigail Ferreira, Ana Breda (2013). "Economics Education Research: Theoretical Foundations and Empirical Research, Directions and Trends in the Past Decades". *Journal of Social Science Education*. Vol. 12. No. 2
- Visa. (2012). "Visa International Financial Literacy 2012". Diunduh 1 Oktober 2015 dari <https://www.practicalmoneyskills.com/summit2012/decks/bod-nar.pdf>
- Walstad, W.B. (1992). "Economics Instruction in High School". *Journal of Economic Literature*. Vol. 30 (December 1992) hal. 2019-2051.
- Walstad, W.B. (1998). "Why it's Important to Understand Economics". Diunduh 2 Oktober 2015 tersedia di



<https://www.minneapolisfed.org/publications/theregion/the-net-the-coming-revolution-in-teaching-economics#>

Worldbank. (2012). "The Global Financial Inclusion (Global Index) Database". Diunduh 1 Oktober 2015 dari [http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EX DEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAM/EXTINRES/EXTGLOBAL/O,,contentMDK:23147627-pagePK:64/68176-piPK:64168140-the-sitePK-8519638,oo.html](http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAM/EXTINRES/EXTGLOBAL/O,,contentMDK:23147627-pagePK:64/68176-piPK:64168140-the-sitePK-8519638,oo.html)